

BAB III

PENANGGUHAN SANKSI EKONOMI UNI EROPA

A. Uni Eropa Sebagai Aktor

1. Kebijakan Politik luar Negeri Uni Eropa

Uni Eropa memiliki kebijakan luar negeri dan keamanannya sendiri, yang memungkinkannya untuk berbicara dan bertindak sebagai satu kesatuan dalam permasalahan dunia. Di dunia internasional dan global, 28 Negara Anggota Uni Eropa memiliki nilai penting dan pengaruh yang lebih besar ketika mereka bertindak secara bersama-sama sebagai Uni Eropa daripada masing-masing tersendiri sebagai 28 negara.

Hal tersebut dikukuhkan oleh Traktat Lisabon tahun 2009 yang menciptakan jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan, yang juga merupakan Wakil Presiden Komisi Eropa, serta dibentuknya Layanan Diplomatik Eropa Layanan Hubungan Luar Negeri Eropa (European External Action Service/EEAS).⁵⁵

Peran Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa adalah untuk memelihara perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB; mendorong kerjasama internasional; dan mengembangkan

⁵⁵ Dikutip dari

serta mengkonsolidasikan demokrasi dan supremasi hukum serta penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar.

Uni Eropa merupakan pemain penting dalam permasalahan internasional, mulai dari pemanasan global sampai konflik di Timur Tengah. Dasar kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa adalah penggunaan diplomasi yang apabila perlu didukung dengan perdagangan, bantuan dan kemanan serta pertahanan untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan internasional.

Besarnya ukuran Uni Eropa yang terdiri atas 28 Negara Anggota secara ekonomi, perdagangan, dan keuangan membuatnya menjadi sebuah kekuatan utama di dunia. Uni Eropa memainkan peran penting dalam permasalahan global dan nilai pentingnya semakin besar karena negara-negara Uni Eropa semakin banyak membuat keputusan-keputusan kebijakan luar negeri secara bersama.

Uni Eropa membentuk kemitraan dengan semua pemain penting di dunia termasuk para pemain baru di mana mereka memiliki pandangan dunia dan kepentingan masing-masing. Uni Eropa berupaya memastikan bahwa kemitraannya didasarkan pada kepentingan dan manfaat bersama, di mana kedua pihak memiliki hak serta kewajiban. Uni Eropa mengadakan pertemuan secara teratur dengan Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Rusia, India dan Cina. Hubungannya dengan negara-negara tersebut dan dengan negara-negara lain mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan,

Melihat dewasa ini Myanmar yang telah banyak melakukan perubahan yang menuju kearah demokrasi, yang mementingkan hak asasi manusia dengan dibebaskannya Aung San Suu Kyi dan beberapa tahanan politik lainnya, dan berjalannya pemilu dengan benar di Myanmar, dengan alasan tersebut Uni Eropa mulai menangguhkan sanksi ekonominya.

2. Kedudukan Uni Eropa Dalam Subyek Hukum Internasional

Proses unifikasi Eropa berjalan dengan referendum yang diadakan di Perancis, Belanda dan lain-lain mengenai dokumen yang disebut sebagai konstitusi Eropa. Konstitusi merupakan ciri utama sebuah negara. Namun konstitusi Eropa memiliki perbedaan karena ia harus dipahami sebagai konstitusi dari sebuah kesepakatan yang membentuk Uni Eropa. Agar konstitusi Eropa bisa diberlakukan, maka dibutuhkan persetujuan dari negara anggota (unanimous approve) sehingga dirasakan ada pengaruh dari hukum internasional di mana negara yang menjadi penentu. Satu saja ada suara sumbang, maka konstitusi tidak bisa diberlakukan.

Selain memiliki konstitusi, Uni Eropa juga membentuk Parlemen Eropa yang dipilih secara langsung oleh rakyat negara anggota. Sebagai kontrol terhadap hukum agar berjalan sesuai dengan aturan, maka dibentuklah Pengadilan Eropa. Selain dengan adanya konstitusi, parlemen dan pengadilan, di dalam Uni Eropa juga terdapat lembaga hukum lain seperti Dewan Uni Eropa dan Komisi Eropa. Tiap institusi di dalam tubuh Uni Eropa memiliki presiden tersendiri serta bertanggung jawab terhadap lembaganya.

Dalam dinamikanya, nampaknya Uni Eropa sangat berhasrat

Ekonomi Eropa menjadi Uni Eropa, wadah ini memberikan daya tarik bagi negara-negara lainnya.

Tercatat bahwa rancangan besar bagi masa depan Eropa yang dituangkan dalam Konstitusi Uni Eropa, ternyata tidak memperoleh tanggapan positif dari rakyat. Melalui referendum yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2005, rakyat Perancis dan, tiga hari kemudian, rakyat Belanda secara jelas menunjukkan penolakan mereka terhadap rancangan tersebut. Secara prinsip penolakan rakyat Perancis dan Belanda merupakan akhir dari Konstitusi Eropa, karena Konstitusi Eropa hanya akan berlaku jika semua negara anggota Uni Eropa yang saat itu terdiri dari 25 negara menyetujuinya.

Penolakan rakyat Perancis dan Belanda terhadap Konstitusi Eropa merupakan pukulan berat bagi para pendukung integrasi Eropa. Sekalipun berbagai jajak pendapat sebelum referendum cenderung menunjukkan indikasi ke arah tersebut, para pendukung integrasi Eropa nampak sangat tidak siap menerima kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Perancis dan Belanda, dua dari enam negara penggagas integrasi Eropa tidak menginginkan integrasi Eropa lebih jauh.

Para pendukung integrasi Eropa cenderung melihat hasil referendum di kedua negara sebenarnya bukan mencerminkan penolakan rakyat kedua negara terhadap Konstitusi Eropa, melainkan merupakan protes terhadap politik atau elit politik nasional mereka masing-masing. Sekalipun referendum Konstitusi Uni Eropa yang sebenarnya dimaksudkan untuk membuat keputusan yang menyangkut masalah bersama Eropa, keputusan yang diambil oleh rakyat kedua negara ternyata sepenuhnya didominasi oleh

inilah yang dilihat oleh Belanda dan Perancis merupakan referendum Konstitusi Eropa

untuk melampiasakan ketidaksenangan mereka terhadap pemerintahan Chirac dan para elit politiknya, sedangkan rakyat Belanda menggunakan referendum untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap perkembangan politik nasional yang ditandai dengan menurunnya kesejahteraan dan rasa ketidakamanan secara drastis.

Beranjak dari keadaan tersebut, kedudukan Uni Eropa sebagai subyek hukum internasional apakah merupakan negara ataupun sebatas organisasi perlu dianalisis lebih jauh. Uni Eropa untuk bisa dikategorikan sebagai subyek hukum internasional, negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki kualifikasi. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan sebagai berikut :

“The state as a person of international law should possess the following qualification”

- a. A permanent population (adanya masyarakat)
- b. A defined territory (adanya daerah/wilayah)
- c. Government (adanya pemerintahan)
- d. Capacity to enter into relations with other states (kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain).⁵⁶

Keempat kualifikasi tersebut nampaknya melekat pada Uni Eropa sebagai sebuah organisasi sehingga seolah Uni Eropa dianggap sebagai sebuah negara. Di lain pihak, untuk bisa dikategorikan sebagai subyek hukum internasional, organisasi internasional harus memiliki kriteria kepribadian internasional. Salah satu pendapat

⁵⁶. Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*. By Ian Brownlie. (Fourth Edition) [Oxford: Clarendon Press. 1990, hal 50

yang patut dikemukakan berkenaan dengan kepribadian internasional dari suatu organisasi internasional adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ian Brownlie :

“The criteria of legal personality in organization may be summarized as follow” :

- a. A permanent association of states, with lawful object, equipped with organs (merupakan persekutuan antara negara-negara secara permanen dengan tujuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum dan dilengkapi organ-organ lainnya).
- b. A distinction, in terms legal powers and purposes, between the organization and its member state (adanya suatu perbedaan dalam kekuasaan hukum dan maksud-maksud serta tujuan dari organisasi internasional atau pada satu pihak dengan negara-negara anggota pada lain pihak).
- c. The existence of legal power exercisable on the international plane and not solely within the system of one or more state (adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan organisasi internasional, tidak saja dalam hubungannya dengan sistem hukum nasional dari suatu negara tetapi juga dalam level internasional).⁵⁷

Dengan berpatokan pada kriteria mengenai kepribadian hukum dan organisasi internasional, maka dapat diketahui bahwa kedudukan Uni Eropa dalam subyek hukum internasional adalah sebagai suatu organisasi internasional yang selangkah lebih maju.

tujuan dan fungsinya sebatas integrasi ekonomi dan politik, bukan membentuk unifikasi-unifikasi baru yang berujung pada pemunculan The United State of Europe.

3. Struktur organisasi Uni Eropa

Struktur organisasi Uni Eropa dipayungi oleh tiga pilar kerjasama:

1. Komunitas Eropa ("European Community") merupakan kerangka hukum yang mewadahi kebijakan komunitas yang berhubungan dengan pasar tunggal ("single market), perdagangan internasional, bantuan pembangunan, kebijakan moneter, pertanian, perikanan, lingkungan, pembangunan daerah, energi dstnya.
2. Kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri ("Common Foreign and Security Policy/CFSP");
3. Peradilan dan masalah dalam negeri ("Justice and Home Affairs") yang menangani kerjasama di bidang hukum perdata dan pidana, kebijakan keimigrasian dan asylum, pengawasan perbatasan, pengawasan lalu lintas obat terlarang, kerjasama kepolisian dan pertukaran informasi.

Ketiga pilar ini diarahkan pada tujuan-tujuan utama dan diatur menurut prinsip-prinsip dasar dan sebagian dengan satu kerangka institusi.

Tujuan-tujuan utama dari Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan social serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal (EURO). Untuk hubungan eksternal keluar, tujuan utama Uni Eropa adalah untuk lebih

menunjukkan identitas ataupun peranan Uni Eropa dalam percaturan internasional

khususnya kebijakan bersama di bidang keamanan dan hubungan luar negeri termasuk pembangunan kebijakan pertahanan bersama.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang dianut Uni Eropa adalah menghargai identitas nasional anggota, demokrasi, dan menjunjung hak azazi manusia. Uni Eropa memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap guna menyokong tiga pilar kerjasama di atas. Berikut adalah institusi dan lembaga terkait Uni Eropa berikut tugas dan kewenangannya:

I. Institusi Uni Eropa:

1. Parlemen

Merupakan institusi satu-satunya yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat negara anggota yang sekarang ini berjumlah 785 anggota. Anggota parlemen dipilih sekali 5 tahun oleh rakyat di seluruh negara anggota yang sekarang berjumlah lebih kurang 492 juta jiwa. Keputusan tentang Undang-Undang UE dibuat oleh parlemen dengan bekerjasama dengan dewan setingkat menteri (council of ministers). Selain itu parlemen juga terlibat dalam membuat draft peraturan-peraturan di bidang misalnya perlindungan lingkungan, hak konsumen, persamaan hak, transportasi, ketenagakerjaan, jasa dan perdagangan.

fungsinya sebagai legislator, sebetulnya Komisi Eropa yang membuat draftnya yang kemudian dibicarakan dan dimodifikasi di rapat dewan sebelum menyetujuinya secara bersama dengan parlemen (co-decision). Jumlah suara yang dimiliki tiap negara di dalam pengambilan keputusan di dewan ditetapkan berdasarkan traktat UE.

3. Komisi Eropa

Komisi Eropa merupakan lembaga eksekutif independen UE. Tugas utamanya adalah merepresentasikan dan menjaga kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. Komisi Eropa bertanggung jawab dalam membuat draft proposal untuk hukum-hukum Eropa yang harus dipresentasikan ke parlemen dan dewan menteri. Sebagai lembaga eksekutif, komisi Eropa menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh parlemen UE dan dewan menteri, dengan kata lain lembaga yang menjalankan tugas harian UE, menerapkan kebijakan, menjalankan program-program dan mendistribusikan dana serta mewakili UE di forum-forum internasional.

Komisi Eropa dibentuk bersamaan dengan parlemen dan dewan menteri (1950 an) berdasarkan traktat pendirian. Komisi Eropa berkedudukan di Brussels dan Luxemburg. Anggotanya sebanyak 27 (satu negara satu komisioner) dipilih sekali dalam 5 tahun. Anggota komisi Eropa mengadakan pertemuan sekali dalam 1 minggu di Brussels

Pengadilan UE dan “Court of First Instance” memiliki presiden masing-masing yang ditunjuk oleh para jaksa sekali dalam 3 tahun.

Lembaga baru yang berada dibawah “Court of First Instance” adalah “European Civil Service Tribunal” yang menangani kasus antara UE dengan pegawainya.

5. Auditor

Lembaga audit. UE ini dibentuk tahun 1975 dan berkedudukan di Luxemburg. Tugas lembaga ini adalah mengaudit penggunaan dana yang berasal dari pembayar pajak dan menjamin penggunaan dana tersebut secara legal, ekonomis dan sesuai tujuan. Lembaga ini berhak mengaudit individu dan organisasi yang menggunakan dana UE. Untuk melakukan hal ini lembaga ini perlu menjaga independensinya dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Tugas kunci lembaga adalah mempersiapkan dan melaporkan hasil audit tahunan ke parlemen dan dewan menteri serta memberikan opini terhadap proposal tentang peraturan keuangan dan anti korupsi dan fraud.

Anggota lembaga ini ditunjuk oleh dewan menteri yang terdiri dari perwakilan tiap tiap negara anggota (27 anggota) yang dipilih sekali dalam 6 tahun dan dapat dipilih lagi. Lembaga ini selanjutnya memilih seorang Presiden dengan masa jabatan 3 tahun.

1. Komite ekonomi dan sosial Eropa

Badan ini merupakan penasehat yang merupakan perwakilan dari tenaga kerja, ikatan buruh, petani, konsumen dan kelompok swadaya masyarakat lainnya. Badan ini menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam diskusi kebijakan dengan parlemen, dewan menteri dan komisi UE.

2. Komite Daerah

Badan ini merupakan badan penasehat yang terdiri dari utusan dari daerah dan otoritas daerah. Badan ini harus dimintai pendapatnya sebelum keputusan tentang kebijakan regional, lingkungan dan transportasi diambil ditingkat UE.

III. Badan Keuangan

1. Bank Investasi Eropa

Tugasnya adalah meminjamkan dana untuk investasi skala besar guna kepentingan UE seperti pelabuhan laut dan udara, konservasi lingkungan, rel kereta api terutama kepada daerah tertinggal, calon anggota dan negara berkembang.

2. Dana Investasi Eropa

3. Bank Central Eropa

Tugas Bank ini adalah untuk mengendalikan Euro, mata uang tunggal UE. Badan ini juga bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan moneter UE. Bank ini berkedudukan di Frankfurt-Jerman.

IV. Badan antar lembaga

1. Kantor publikasi resmi UE

Berfungsi sebagai rumah publikasi UE bagi seluruh organisasi UE termasuk memproduksi dan mendistribusikan semua publikasi cetak dan elektronik UE.

2. Kantor perekrutan personalia UE

Setelah dibentuk tahun 2003, badan ini berfungsi menyusun materi ujian seleksi personalia yang akan bekerja di organisasi UE yang lebih efisien dibanding kalau setiap institusi memiliki satu departemen SDM. Dana yang dihabiskan lembaga ini sekitar 21 juta Euro setiap tahunnya (11 % lebih sedikit dibanding kalau dilaksanakan di setiap institusi).

3. Sekolah Administrasi Eropa

Sekolah ini didirikan pada tanggal 10 Februari 2005 yang bertugas

diberikan terbuka untuk seluruh staff dari seluruh instansi UE dengan tujuan menanamkan nilai-nilai dasar, pemahaman yang lebih baik dan skala ekonomis. Sekolah ini bekerjasama dengan departemen pelatihan instansi lain EU.

B. Perubahan politik Myanmar

Perubahan politik yang terjadi di Myanmar sejauh ini membuahkan hasil yang diapresiasi positif oleh dunia internasional. Walaupun Pemilu 2010 yang dimenangkan oleh *Union Solidarity and Development Party (USDP)* mendapat protes dari partai oposisi, *National League for Democracy (NLD)*, namun dibawah pemerintahan Thein Sein yang diangkat menjadi Presiden paska kemenangan pemilu 2010, perubahan-perubahan besar terus terjadi mulai dari pembebasan tahanan politik, termasuk pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi, hingga pembukaan diri Myanmar pada dunia internasional yang salah satunya ditandai dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, pada Desember 2011 lalu. Hal terbaru dalam transisi politik tersebut adalah kemenangan besar NLD pada pemilu sela yang diadakan bulan Maret 2012 sebagai kemajuan besar yang akan membawa Myanmar ke era kebebasan yang telah lama diharapkan.

Terselenggaranya pemilu 2010 di Myanmar tidak serta merta memberikan ruang pada transformasi demokrasi yang terjadi di negara tersebut. ASEAN dan PBB merupakan dua pihak eksternal yang memandang positif pada pemilu yang digelar di Myanmar, namun demikian, berbeda dengan pihak oposisi, sejumlah negara Barat, Uni Eropa, dan kelompok pendukung HAM dan demokrasi, yang merasa skeptis pada hal

wajar, karena Myanmar yang telah berada dibawah kekuasaan militer sejak tahun 1962 dan sempat mengalami pemilu yang dibatalkan tahun 1990 ketika rezim militer menolak hasil pemilu yang dimenangkan oleh NLD. Dalam pemilu 2010 pun pergolakan tetap terjadi karena pihak oposisi dan pengamat politik menyatakan bahwa kecurangan masih terjadi, dimana dalam pemilu tersebut, USDP memenangkan kursi terbanyak sejumlah 883 dari 1.154 kursi di Parlemen.⁵⁸

Terlepas dari pergolakan dan alasan diadakannya pemilu 2010, pembebasan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah tanggal 13 November 2010 lalu, telah membawa semangat baru bagi tumbuhnya demokrasi di Myanmar. Aung San Suu Kyi yang telah menjadi tahanan rumah sejak tahun 1989 merupakan tokoh penting dalam pertumbuhan demokrasi di Myanmar, yang juga putri Jenderal Aung San, tokoh pejuang kemerdekaan Myanmar dari kolonial Inggris. Pembebasan Aung San Suu Kyi, yang pernah mendapatkan Nobel Perdamaian 1991, juga sangat diapresiasi oleh dunia internasional.

C. Penangguhan Sanksi Ekonomi Uni Eropa

Dengan adanya perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam politik Myanmar, yang mana perubahan itu menunjukkan ke arah demokrasi, sehingga Uni Eropa mengeluarkan penangguhan sanksi ekonomi terhadap Myanmar.

⁵⁸ The irrawaddy Burma Election 2010, dikutip dari <http://election.irrawaddy.org/news/612-usdp-wins->

1. Pernyataan Ashton.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Catherine Ashton menyatakan *"The European Union welcomes the remarkable changes in Burma/Myanmar and has decided to open a new chapter in our relations. Now that the sanctions will be effectively suspended, we encourage trade and investment in the country"*⁵⁹

Uni Eropa menyambut perubahan yang luar biasa di Burma / Myanmar dan telah memutuskan untuk membuka sebuah babak baru dalam hubungan kami. Sekarang bahwa sanksi akan efektif dihentikan, kami mendorong perdagangan dan investasi di negara ini.

Penangguhan terkait langkah-langkah perdagangan kepedulian dan investasi di sektor penebangan, pengolahan kayu dan pertambangan logam mulia dan batu mulia. Selain itu, orang yang terlibat dalam kebijakan yang menghambat Burma / Myanmar transisi menuju demokrasi dan perusahaan milik militer atau perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah Burma / Myanmar menjadi sasaran membekukan aset dan larangan perjalanan.

Sesuai dengan keputusan Dewan Uni Eropa pada 23 April 2012 tentang keputusan dewan terhadap Burma / Myanmar yang berisi

⁵⁹ Burma/Myanmar: EU sanctions suspended Dikutip dari <http://www.eu->

- a. Uni Eropa telah diikuti dengan hormat dan penghargaan perubahan bersejarah di Myanmar / Burma selama tahun lalu dan mendorong reformasi yang luas untuk terus di bawah Presiden U Thein Sein, Pemerintah dan DPR, dalam mengembangkan kemitraan dengan aktor politik dan masyarakat sipil, termasuk Daw Aung San Suu Kyi. Reformasi ini akan membutuhkan waktu untuk menerapkan dan berbuah. Dasar untuk pengembangan adalah pemerintahan yang sah, aturan hukum dan rekonsiliasi nasional. Uni Eropa memuji sifat damai proses dan kesiapan para pihak untuk bekerja menuju tujuan yang sama, dengan visi bersama untuk reformasi politik, sosial dan ekonomi.
- b. Hal ini juga menyambut langkah-langkah konkrit yang diambil terhadap tujuan ini:
- Perilaku transparan dan kredibel keseluruhan oleh-pemilu pada tanggal 1 April, sehingga pemilihan Daw Aung San Suu Kyi dan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi, yang akan mendukung langkah-langkah menuju rekonsiliasi nasional;
 - Kemajuan pada perubahan dalam hukum dan praktek untuk memungkinkan kebebasan berkumpul dan berserikat dan menghilangkan penggunaan kerja paksa;
 - Pelepasan sejumlah besar tahanan politik dan Pemerintah kesediaan

- Upaya Pemerintah untuk menyimpulkan perjanjian gencatan senjata dengan kelompok bersenjata didaerah etnis, khususnya dengan Uni Nasional Karen, dan kesiapannya untuk melihat arah yang lebih luas dan penyelesaian politik lebih tahan lama.
- c. Hal ini dan perkembangan lainnya belum pernah terjadi sebelumnya memungkinkan Uni Eropa untuk membuka bab baru dalam hubungan dengan Myanmar / Burma. Oleh karena itu Dewan menyambut kunjungan resmi mendatang Perwakilan Tinggi ke negara, menandai awal baru dalam hubungan bilateral, seperti yang disorot oleh pembukaan Kantor Uni Eropa di Yangon.

Sebagai sarana untuk menyambut dan mendorong proses reformasi, Dewan akan menanggukhan tindakan pembatasan yang dikenakan pada Pemerintah, dengan pengecualian dari embargo senjata, yang akan mempertahankan. Dewan akan memonitor situasi di lapangan, terus langkah-langkah di bawah review konstan dan merespon positif untuk kemajuan pada reformasi yang sedang berjalan.

- d. Dalam hal ini, Uni Eropa masih mengharapkan pembebasan tanpa syarat sisa tahanan politik dan penghapusan semua pembatasan ditempatkan pada mereka yang sudah dirilis. Ini menantikan berakhirnya konflik dan secara substansial meningkatkan akses bagi bantuan kemanusiaan, khususnya untuk

sepanjang perbatasan Timur, serta untuk mengatasi status dan meningkatkan kesejahteraan Rohingya.

- e. Uni Eropa sekarang ingin masuk ke dalam sebuah kolaborasi aktif dengan Myanmar / Burma secara keseluruhan, dengan maksud untuk membantu proses reformasi dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, politik dan sosial.
- f. Atas dasar pembahasan para Menteri Pembangunan Uni Eropa akan memiliki bulan Mei, Uni Eropa akan terus terlibat dalam dialog dan kerja sama dengan pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dalam bidang berikut:
 - Uni Eropa berharap dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah dan lain-lain yang bersangkutan untuk mendukung proses membawa perdamaian dan stabilitas ke daerah etnis dan membuka perspektif jangka panjang untuk pengembangan mereka, sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional;
 - Uni Eropa dan negara anggotanya telah mengumumkan pendanaan baru yang signifikan untuk pembangunan ekonomi dan sosial, transformasi demokratis dan penguatan masyarakat sipil dan kapasitas administrasi publik di tingkat pusat dan daerah, dalam rangka membantu meningkatkan tata pemerintahan

- Uni Eropa siap untuk membantu semua pihak dalam upaya mereka untuk memperkuat supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, Uni Eropa berharap untuk bekerja dengan legislatif dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Uni Eropa juga akan bekerja sama dengan pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan, dalam meninjau sistem pemilihan dengan maksud untuk pemilihan umum tahun 2015.

Di semua daerah, koordinasi donor akan menjadi penting dan Uni Eropa terlihat ke Myanmar / Burma otoritas untuk menunjukkan kepemimpinan dalam hal ini, membina konsultasi luas dengan semua pemangku kepentingan, termasuk partai politik, pemerintah daerah dan masyarakat sipil, menerapkan prinsip-prinsip seperti partisipasi, inklusi, transparansi dan akuntabilitas. Ini akan dibahas di Luar Negeri berikutnya Council / Pengembangan.

- g. Uni Eropa mengakui kontribusi penting sektor swasta harus membuat untuk pengembangan Myanmar / Burma dan akan menyambut perusahaan-perusahaan Eropa menjelajahi perdagangan dan peluang investasi. Hal ini harus dilakukan dengan mempromosikan praktek standar tertinggi integritas dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini diletakkan dalam Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, prinsip-prinsip PBB untuk bisnis dan hak asasi manusia dan memiliki strategi CSR Uni Eropa 2011-2014. Uni Eropa akan bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat

- h. Dewan mendukung mengembalikan Generalized System of Preferences (GSP) untuk Myanmar / Burma sesegera mungkin setelah kondisi yang diperlukan terpenuhi, menyusul penilaian dari Organisasi Perburuhan Internasional.
- i. Uni Eropa juga menyambut baik kesediaan Pemerintah untuk mengatasi risiko lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu mendorong Pemerintah untuk memulai dialog dengan Uni Eropa pada cara-cara untuk menjamin pengelolaan hutan lestari / Burma Myanmar dan pemanenan kayu sesuai dengan perundang-undangan nasional, konsisten dengan memerangi kemiskinan dan mengamankan mata pencaharian. Ini akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam industri ekstraktif serta dalam perlindungan lingkungan, khususnya melalui Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT).
- j. Uni Eropa sekarang berharap untuk masa depan di mana ia akan dapat bekerja sama secara konstruktif dengan Pemerintah dan rakyat Myanmar / Burma untuk membina persatuan dan membangun kemakmuran.⁶⁰

2. Langkah Kongkrit Uni Eropa Dalam Penangguhan Sanksi

Pada Selasa (22 April) dalam pertemuan di Luksemburg, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa telah sepakat menghapuskan semua embargo ekonomi dan

perdagangan terhadap Myanmar serta sanksi terhadap perseorangan-perseorangan. Gerak-gerik ini dianggap sebagai pacuan penting, membuka satu halaman baru dalam hubungan antara Uni Eropa dengan negara di Asia Tenggara ini. Keputusan penghapusan embargo yang diajukan Uni Eropa terhadap Myanmar dikeluarkan tepat setahun setelah Uni Eropa memutuskan melonggarkan sebagian besar sanksi perdagangan, ekonomi dan perseorangan terhadap Myanmar sendiri, kecuali embargo senjata. Kongkritnya ialah Uni Eropa akan menghapuskan sanksi terhadap kira-kira 800 perusahaan yang beraktivitas di bidang perikanan, eksploitasi mineral, mengizinkan melakukan investasi pada kira-kira 50 perusahaan yang dekat dengan pemerintah, menghentikan semua pembatasan imigrasi dan perintah larangan bepergian yang berpengaruh terhadap kira-kira 500 warga Myanmar ke negara-negara Uni Eropa.

Penyebab mengapa para Menteri Luar Negeri 27 negara anggota Uni Eropa setuju menghapuskan embargo terhadap Myanmar ialah proses pembaruan mengesankan yang dilakukan negara di Asia Tenggara ini setelah serentetan reformasi yang mendalam dan luas, baik tentang politik maupun ekonomi. Penanggung jawab politik hubungan luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton memberitahukan bahwa tujuan Uni Eropa ialah mendukung semua pekerjaan melakukan reformasi di negara Asia Tenggara ini dan gerak-gerik itu tentunya membuat Pemerintah Myanmar merasa puas dan membuka jalan bagi badan-badan usaha asing untuk melakukan aktivitas di Myanmar.

Bisa dikatakan, penghapusan hampir semua embargo oleh Uni Eropa terhadap Myanmar di satu segi memantapkan semua komitmen Uni Eropa dalam

terlambat dalam mendekati pasar Myanmar, terutama pada latar belakang Jepang menyatakan selangkah demi selangkah menghapuskan utang sebanyak USD 3,7 miliar dan memulihkan semua komitmen bantuan perkembangan untuk mendukung reformasi ekonomi Myanmar. Australia juga mengumumkan akan menghapuskan sanksi terhadap Presiden Myanmar dan lebih dari 200 warga negara ini yang sedang dilarang bepergian dan tentang keuangan. Sebelumnya, Amerika Serikat telah menyatakan selangkah demi selangkah melonggarkan semua pembatasan keuangan terhadap negara Asia Tenggara ini.⁶¹

Langkah baru Uni Eropa itu akan mengizinkan semua perusahaan Eropa melakukan investasi di Myanmar- negara uang kaya dengan sumber daya alam, terutama dalam pengembangan industri eksploitasi mineral - satu bidang yang menguntungkan semua investor Eropa. Lebih- lebih lagi, pada masa belakangan ini, Myanmar juga mengizinkan melakukan tender untuk mengeksploitasi minyak dan gas di negara ini. Selain itu, bidang-bidang lain, misalnya perbankan dan telekomunikasi juga sangat menarik bagi Eropa. Sebelum Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengeluarkan keputusan, banyak perusahaan Eropa telah menyampaikan keinginan mencurahkan modal ke Myanmar, misalnya perusahaan beer Carlsberg (Denmark) telah menyatakan akan kembali ke Myanmar setelah semua sanksi internasional dihapuskan.

Keputusan Uni Eropa tentang menghapuskan embargo terhadap Myanmar juga mendapatkan sambutan hangat dari kalangan wirausaha Myanmar. Wakil Ketua Gabungan Kamar Dagang dan Industri, Ketua Asosiasi semua produsen tekstil dan

⁶¹ . dikutip dari <http://vovworld.vn/id-id/Ulasan-Berita/Titik-balik-baru-dalam-hubungan-Uni-Eropa-Myanmar-1140077> . diakses dalam bukunya Uni Eropa Myanmar. Diakses pada tanggal 26

produk tekstil Myanmar, Myint Soe menyatakan bahwa keputusan Uni Eropa itu akan membuka satu pasar penting untuk komoditas negara ini.

Akan tetapi, bagi Uni Eropa, penghapusan embargo terhadap Myanmar hanya merupakan langkah pertama yang mereka jalankan terhadap negara di Asia Tenggara ini, karena Myanmar sekarang masih kekurangan banyak persyaratan tentang infrastruktur, terutama aspek hukum untuk membuat para investor bisa tenang berusaha. Transparansi dalam manajemen di Myanmar juga merupakan hal yang mengkhawatirkan kalangan investor ketika negara ini terdaftar pada posisi ke 172 diantara 174 negara tentang transparansi dan korupsi. Selain itu, masih ada keengganan tentang gelombang kekerasan bentrokan etnis di Myanmar.⁶²

Pengaruh dari keputusan Uni Eropa tentang embargo ekonomi dan perdagangan terhadap Myanmar meskipun memerlukan waktu untuk membuktikan-nya, tetapi keputusan ini telah siaga membuka satu halaman baru dalam hubungan dengan Myanmar, menempatkan fundasi bagi pembangunan hubungan kemitraan yang berkesinambungan.

Sebagai bentuk kongkrit dari penangguhan sanksi Uni Eropa, Presiden Myanmar Thein Sein dalam rangka kunjungan 10 harinya di Eropa, bertemu dengan Ketua Komisi Eropa Jose Manuel Barosso, Presiden Uni Eropa Herman van Rompuy dan pejabat urusan luar negeri Eropa Catherine Ashton.

Pada tanggal 14 Juli 2012 Presiden Myanmar mengunjungi Inggris dan Perancis, perjalanan keduanya ke Eropa dalam beberapa bulan terakhir, di tengah

meningkatnya dukungan bagi reformasi dalam negeri yang telah dilaksanakan sejak menjabat pada tahun 2011,⁶³

Sebelumnya, untuk meningkatkan hubungan, Thein Sein mengunjungi beberapa negara Eropa pada bulan Maret - meskipun pada waktu itu Inggris dan Perancis tidak masuk dalam jadwal perjalanannya.

⁶³ . dikutip dari <http://khabarsoutheastasia.com/id/articles/apwi/articles/newsbriefs/2013/07/16/newsbrief->